

ANALISIS DAMPAK PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN MORATORIUM KAPAL EKS ASING TERHADAP NELAYAN DI PELABUHAN PERIKANAN POUMAKO

Samsinar Nur¹, Ludia Panggalo²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan Timika

Email : samsinarnur22@gmail.com

email: stie@stiejb.ac.id

Abstract

This research was conducted at Poumako Fisheries Port, East Mimika District, Mimika Regency. This study aims to determine the impact of the Ex-Foreign Ship Moratorium Policy on fishermen at Poumako Fishing Port. The method used in this study is a comparative method that aims to determine the comparison between variables. The data collection techniques used to obtain data in this study were observation, interviews and questionnaires. The analysis tool used is the Statistical Test of Two Correlated Samples or Paired T-test. The results of this study show that: The implementation of the moratorium policy on ex-foreign vessels has an impact on fishermen's catches, incomes, and mileage at Poumako FishingPort.

Keywords: *Moratorium Policy, Ex-Foreign Ships, Fishermen*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia yang merupakan lautan. Titel negara kepulauan yang didapat Indonesia juga didukung dengan kondisi sumber daya alam yang dimiliki, terutama dalam bidang kelautan. Kondisi sumber daya laut di Indonesia dapat dijelaskan melalui letak Indonesia yang berada di daerah khatulistiwa dengan

karakteristik geologi, geografi dan lingkungan hidup yang mendukung, menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi.

Secara ekonomi, hasil sumberdaya kelautan telah memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDB nasional sebesar 22 % pada tahun 2014. Padahal wilayah Indonesia mencapai 5.193.253 km², yang terdiri atas 1.890.754 km² daratan

dan 3.302.498 km² adalah lautan (Seminar Indonesia 2014-2019, Poros Maritim untuk Kesejahteraan dan Keadilan, Rokhmin Danuri, Menara Batavia, Kamis 14 Agustus 2014). Secara biofisik, wilayah pesisir di Indonesia merupakan pusat biodiversity laut tropis dunia karena hampir 30% hutan bakau dan terumbu karang dunia terdapat di Indonesia. Namun, kekayaan pesisir dan kelautan yang kita miliki, terdapat lebih dari 5.254.400 orang di wilayah pesisir hidup dalam kondisi yang sangat miskin (Mahmudah, 2015: 2).

Yang terjadi selama ini ialah potensi besar perikanan banyak dimanfaatkan oleh mayoritas kapal-kapal besar dan berkepemilikan asing, ini membawa kerugian tersendiri bagi kedaulatan maritim Indonesia. Pasalnya, masyarakat Indonesia yang lebih banyak berprofesi sebagai nelayan tetapi belum mampu bersaing secara teknologi dan peralatan tangkap sehingga pemanfaatan hasil laut belum mampu dioptimalkan.

Menurut Sianturi (2016: 54) terdapat 1.132 kapal eks asing yang dimiliki oleh 187 pemegang izin di 33 pelabuhan di seluruh Indonesia yang izinnnya aktif pertanggal 3 november 2015, dilakukan analisa dan evaluasi terhadap izin yang masih aktif. Ditemukan 99 % pelanggaran yang di lakukan oleh 1.132 kapal eks asing tersebut, melihat kondisi kapal asing diatas yang jumlahnya tidak sedikit menunjukkan bahwa kurang maksimalnya pemanfaatan

sumberdaya laut yang diperparah dengan lemahnya sistem keamanan laut. Maraknya kasus pencurian ikan oleh kapal-kapal besar dengan peralatan yang lebih canggih menunjukkan bahwa pengawasan dan perlidungan terhadap wilayah perairan Indonesia kurang diperhatikan.

Pelanggaran di dalam dunia kelautan dan perikanan lebih sering disebut dengan illegal fishing. Beberapa modus illegal fishing di perairan Indonesia yang dilakukan oleh KII (Kapal Ikan Indonesia) antara lain, (a) Ketidaklengkapan surat izin, (b) Memiliki izin tapi melanggar ketentuan tertentu, (c) Pemalsuan/manipulasi, (d) Transshipment di tengah laut, (e) Tidak mengaktifkan transmitter, (f) Penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing), dll. (Sianturi, 2016: 51)

Lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum terhadap para pelaku illegal fishing ini telah menyebabkan para pelakunya tidak pernah jera. Proses hukum yang ada selama ini hanya menyentuh kalangan awak kapal semata tanpa berusaha mengungkap otak pelaku yang sesungguhnya, yaitu Corporate yang mendukung kegiatan tersebut. Hal ini menyebabkan kerugian besar terhadap negara, kalangan nelayan tradisional, dan masyarakat pesisir.

Sebagai salah satu solusi dalam menjawab permasalahan tersebut, Kementerian Keautan dan Perikanan mengeluarkan kebijakan moratorium (pelarangan/

pemberhentian sementara) yang tertuang dalam Peraturan Menteri No.56/20154 bagi kapal-kapal asing dalam beroperasi di Perairan Indonesia, peraturan moratorium ini hanya diperuntukan bagi kapal eks asing di atas 30 GT, yakni kapal yang produksinya dilakukan di luar negeri. Dengan adanya kebijakan ini, memungkinkan membawa dampak positif dalam peningkatan jumlah produksi di pelabuhan basis kapal lokal. Artinya, pengelolaan kekayaan sumber daya laut mulai dikembalikan kepada nelayan dalam negeri.

Dengan melihat potensi laut Indonesia, laut arafura merupakan wilayah perairan yang menyimpan sumber daya alam perikanan yang sangat potensial, letak laut Arafura adalah laut yang terletak di antara wilayah Australia dan Pulau Papua, tepatnya di sebelah selatan kepulauan Aru dan berada di wilayah Samudra Pasifik. Sehingga, Kabupaten Mimika juga menjadi daerah yang terdampak pada kebijakan moratorium ini dimana sebelum kebijakan ini berlaku kapal-kapal nelayan yang jumlahnya sedikit, ini disebabkan ketidaktarikan akan menjadi nelayan yang jumlah tangkapan serta penggunaan BBM yang sia-sia sehingga belum bisa dipastikan akibat kapal-kapal asing beroperasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala operasional PT. Minatama Mutiara yang menaungi kapal-kapal asing pada pelabuhan perikanan Poumako sekitar 100 buah kapal

asing yang berhenti beroperasi, berhentinya kapal-kapal tersebut karena berlakunya kebijakan moratorium, dengan berhenti operasinya kapal asing tersebut maka berdampak pula pada nelayan lokal yang di mana sebelum kebijakan ini berlaku mereka hanya mendapat tangkapan sisa dari kapal besar dan kapal asing tersebut yang ukurannya jauh lebih besar di karenakan alat tangkap mereka yang mampu menangkap banyak sekaligus.

Dengan berlakunya kebijakan ini juga berdampak baik pada nelayan itu sendiri seperti jarak tempuh yang tidak sejauh sebelumnya, pengiritan penggunaan bahan bakar sehingga upaya meningkatkan perekonomian serta kesejahteraannya terpenuhi. Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti akan meneliti "Analisis Dampak Pemberlakuan Kebijakan Moratorium Kapal Eks Asing Terhadap Nelayan di Pelabuhan Perikanan Poumako".

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Perikanan

Menurut Pujiati (Erwin, 2017: 10) sumber daya ikan merupakan sumberdaya alam yang sifatnya dapat diperbaharui.

Adapun tujuan pembangunan perikanan, Pujiati (Erwin, 2017: 11) yaitu:

- a. Meningkatkan produksi dan produktifitas.

- b. Meningkatkan kesejahteraan petani ikan (nelayan) melalui perbaikan pendapatan.
- c. Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
- d. Menjaga kelestarian sumberdaya hayati perikanan.

Nelayan

Menurut Undang-Undang No. 9 tahun 1985 tentang perikanan, nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Sedangkan menurut istilah baku yang dikeluarkan oleh Balai Informasi Pertanian tahun 1979 nelayan adalah pemilik atau buruh yang sebagian atau seluruh pendapatannya diperoleh melalui kegiatan pendapatan ikan di laut atau perairan umum, baik laki-laki maupun perempuan.

Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Ditinjau dari aspek teknis, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16 tahun 2006. Klasifikasi pelabuhan perikanan adalah:

- a. Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS)
- b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
- d. Pusat Pendaratan Ikan (PPI)

Pengertian Illegal Fishing

Illegal Fishing berasal dari kata illegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi. Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata fish

dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil; merogoh; mengail, atau memancing.

Bentuk Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia

Menurut Mahmudah (2015: 81) bahwa beberapa modus atau jenis kegiatan illegal yang sering dilakukan oleh kapal ikan Indonesia, antara lain: penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI).

Merujuk pada pengertian illegal fishing tersebut, secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan illegal fishing yang umum terjadi di Indonesia, yaitu:

- a. Penangkapan ikan tanpa izin;
- b. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
- c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
- e. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.

Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing

Kebijakan sistem pemidanaan dalam penanggulangan tindak pidana illegal fishing diatur didalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menerapkan pidana berupa pidana kurungan paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp

20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Kerugian Akibat Illegal Fishing

Menurut Mahmudah (2015: 98) Kerugian yang ditimbulkan oleh illegal Fishing tidak hanya sekedar dihitung berdasarkan nilai ikan yang dicuri, tetapi memiliki dampak yang cukup luas antara lain sebagai berikut:

- a. Subsidi BBM dinikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak.
- b. Pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- c. Peluang kerja nelayan Indonesia (lokal) berkurang, karena kapal-kapal illegal adalah kapal-kapal asing yang menggunakan ABK asing.
- d. Hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negeri.
- e. Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya.
- f. Merusak citra Indonesia pada kancah internasional karena illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Indonesia maupun kapal milik warga negara Indonesia.

Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014

Berdasarkan kebijakan moratorium, adalah penghentian sementara di lakukan untuk pengajuan perizinan baru kapal eks-asing diatas 30 Gross Ton (GT). Kebijakan tersebut diatur mengenai Penghentian sementara

(moratorium) perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kebijakan tersebut hanya diperuntukkan kepada kapal eks-asing diatas 30 Gross Ton (GT), yakni kapal yang pembangunannya dilakukan di luar negeri dan mendapatkan surat ijin beroperasi di Indonesia. Selama moratorium diberlakukan, perizinan kapal berupa izin baru mencakup Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) akan ditangguhkan dan diterbitkan. Selanjutnya akan dilakukan analisis dan evaluasi bagi SIPI dan SIKPI yang masih berlaku.

Indikator Efektivitas Kebijakan Moratorium Kapal Eks-Asing

Menurut UU Kementerian Kelautan Dan Perikanan (Sianturi,2016:53), Kebijakan moratorium kapal eks-asing dinyatakan efektif apabila memenuhi lima indikator yaitu:

- a. Pengurangan jumlah tindak illegal Fishing yang terjadi di perairan Indonesia.
- b. Implementasi kebijakan moratorium kapal eks-asing berjalan dengan baik.
- c. Konsep supply chain management berpengaruh pada industri perikanan serta konsep kepentingan negara yang disebabkan oleh moratorium kapal eks-asing.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana, yang menunjang

proses dalam pelaksanaan moratorium kapal eks-asing.

- e. Tingkat kepuasan pemerintah dan pengamat dan pelaku perikanan terhadap hasil pencapaian kebijakan moratorium kapal eks-asing.

Indikator Peningkatan Kesejahteraan

Menurut Puryono (Erwin, 2017:24) Untuk mengukur keberhasilan pengelolaan sumberdaya kelautan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan nasional, dapat dilihat dengan indikator keberhasilan yang mendukung tercapainya pengelolaan sumberdaya kelautan yang diharapkan sebagai berikut :

- a. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan kelautan sangat mutak diperlukan untuk mewujudkan kemandirian bangsa.
- b. Meningkatnya kemampuan SDM pengelola kelautan, sebagian besar nelayan masih tertinggal dibandingkan komunitas masyarakat lain. Nelayan sering disebut masyarakat termiskin. Salah satu sebabnya adalah tingkat pendidikan mereka yang masih rendah.
- c. Pengembangan pasar, Indonesia memang telah dikenal sebagai salah satu produsen perikanan dunia, namun belum termasuk dalam

kelompok Negara pengekspor produk perikanan yang utama. Artinya, sebagian besar produk perikanan tangkap dan perikanan budi daya nasional masih untuk konsumsi dalam negeri.

- d. Prasarana yang berkembang, prasarana lain yang perlu dibangun adalah pelabuhan-pelabuhan pendaratan ikan yang telah dilengkapi pengelola di titik-titik strategis pantai produktif di seluruh Indonesia.
- e. Efektivitas pengolahan hasil kelautan, pengelolaan hasil tangkapan laut harus dapat diolah sebaik mungkin dan mampu memberikan nilai tambah kepada nelayan.
- f. Peningkatan taraf hidup nelayan, pengelolaan sumberdaya kelautan secara profesional akan menciptakan nilai tambah pada kehidupan nasional. Jika tingkat pendapat nelayan meningkat, kesejahteraan meningkat dan standar hidup layak telah dapat dinikmati oleh nelayan, artinya pembangunan kelautan kita telah berhasil.
- g. Manajemen sumberdaya perikanan, dalam manajemen sumberdaya, perikanan dikenal beberapa kebijakan pengaturan pemanfaatan, diantaranya: larangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, larangan daerah penangkapan, larangan waktu penangkapan, larangan ukuran penangkapan minimal

- (misalnya melalui pengaturan mata jaring).
- h. Pengaturan alat tangkap, pelarangan alat tangkap dan metode penangkapan yang tidak ramah lingkungan pengaturan mata jaring minimal, membatasi alat tangkap dan mendorong pemakaian alat tangkap yang lebih ramah lingkungan (misalnya pancing ulur, bubu, dsb), standarisasi alat tangkap.
 - i. Pengembangan industri kelautan dan perikanan, perlu di perbanyak perusahaan perikanan yang mampu menyerap hasil ikan dari pelaku usaha kecil.

Pengertian Pendapatan

Menurut Sa'adah (2017: 67) Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, pemberian jasa atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas.

RANCANGAN PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah komparatif yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil tangkapan nelayan, pendapatan serta jarak tempuh nelayan sebelum dan sesudah berlakunya

kebijakan moratorium kapal eks asing di Pelabuhan Perikanan Poumako.

Daerah dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Pelabuhan Perikanan Poumako. Objek penelitian adalah dampak pemberlakuan kebijakan moratorium kapal eks asing terhadap nelayan di Pelabuhan Perikanan Poumako.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini terdiri atas tiga yaitu:

- a. Populasi subjek penelitian ini adalah nelayan di Pelabuhan Perikanan Poumako.
- b. Populasi responden penelitiannya adalah nelayan yang berada di Pelabuhan Perikanan Poumako..
- c. Populasi objek penelitian ini adalah dampak pemberlakuan kebijakan moratorium kapal eks asing terhadap tangkapan, pendapatan dan jarak tempuh nelayan di Pelabuhan Perikanan Poumako.

Sampel

Sampel dalam penelitian ini yaitu nelayan yang berada di Pelabuhan Perikanan Poumako. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel acak sederhana yaitu memberikan kesempatan yang samabagi setiap populasi untuk menjadi sampel penelitian.

Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tangkapan nelayan, data pendapatan dan data jarak tempuh dengan menggunakan metode kusioner.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui kusioner, dalam hal ini penulis melibatkan nelayan sebagai sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu: nelayan lokal di Pelabuhan Peikanan Poumako.
- b. Sumber Sekunder adalah data yang diperoleh melalui kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mimika.

Instrumen Penelitian

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data, penulis

menggunakan teknik pengumpulan data berupa Kusioner, Wawancara dan Observasi.

Instrumen Analisis Data

Instrumen yang di gunakan dalam menilai penelitian ini adalah untuk mengukur dampak pemberlakuan kebijakan moratorium kapal eks asing terhadap nelayan sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan di Pelabuhan Perikanan Poumako dengan Uji dua sampel berkorelasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis

Analisis data dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan signifikan terhadap nelayan di Pelabuhan Perikanan Poumako dengan batasan yaitu tangkapan, pendapatan dan jarak tempuh melaut sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan moratorium kapal eks asing.

Deskripsi Data

Tabel 4.1
Jumlah Nelayan dan Jumlah Armada Tangkap Periode 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Nelayan	11.176	11.180	11.180	4.033	4.846	17.681
2	Jumlah Armada	146	147	25	-	626	980

Perbedaan tangkapan ikan nelayan sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan moratorium kapal eks asing

Tabel 4.2
Hasil Uji Paired t-test

Paired Samples Test									
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	T_SEBELUM T_SUSUDAH	-7585,00000	6306,36173	1151,37886	-9939,83417	-5230,16583	-6,588	29	,000

Sumber: Data diolah SPSS 20, 2020

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa hasil output SPSS untuk hasil tangkapan nilai probabilitas (sig) yaitu 0,000, karena probabilitas (sig) $0,000 < 0,05$ dan t-hitung sebesar $-6,588 > t$ -tabel dengan df 29 yaitu 2,045 dengan

demikian H_a diterima dan H_o ditolak artinya terdapat perbedaan sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan moratorium kapal eks asing terhadap hasil tangkapan nelayan di Pelabuhan Perikanan Poumako.

Perbedaan Pendapatan nelayan sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan moratorium kapal eks asing

Paired Samples Test									
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the				
					Lower	Upper			
Pair 1	PEND_SEBELUM PEND_SESUDAH	-223165000,00000	160680169,12488	29336051,05781	-283163961,20655	-163166038,79345	-7,607	29	,0

Sumber: Data diolah SPSS 20, 2020

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa hasil output SPSS untuk pendapatan nilai probabilitas (sig) yaitu 0,000, karena probabilitas (sig) $0,000 < 0,05$ dan t-hitung sebesar $-7,607 > t$ -tabel dengan df 29 2,045 dengan demikian H_a

diterima dan H_o ditolak artinya terdapat perbedaan sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan moratorium kapal eks asing terhadap hasil pendapatan nelayan di Pelabuhan Perikanan Poumako.

Perbedaan Jarak tempuh sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan moratorium kapal eks asing

Tabel 4.4
Hasil Uji Paired t-test

Paired Samples Test									
		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence				
					Lower				Upper
Pair 1	JARAK_SEBELUM JARAK_SESUDAH	24,83333	9,95536	1,81759	21,11594	28,55073	13,663	29,000	

Sumber: Data diolah SPSS 20, 2020

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa hasil output SPSS untuk jarak tempuh menunjukkan nilai probabilitas (sig) yaitu 0,000, karena probabilitas (sig) $0,000 < 0,05$ dan t-hitung sebesar 13,663 $>$ t-tabel dengan df 29 2,045 maka dengan demikian H_0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan moratorium kapal eks asing terhadap jarak tempuh nelayan di Pelabuhan Perikanan Poumako.

Pengujian Hipotesis

Adapun hasil Uji Paired T test dalam menentukan uji hipotesis penelitian ini adalah:

- Berdasarkan hasil analisis terhadap hasil tangkapan yaitu terdapat perbedaan hasil tangkapan sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan moratorium kapal eks asing pada nelayan di Pelabuhan Perikanan Poumako. Dengan demikian hipotesis diterima.
- Berdasarkan hasil analisis terhadap pendapatan

yaitu terdapat perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan moratorium kapal eks asing pada nelayan di Pelabuhan Perikanan Poumako. Dengan demikian hipotesis diterima.

- Berdasarkan hasil analisis terhadap jarak tempuh yaitu terdapat perbedaan jarak tempuh sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan moratorium kapal eks asing pada nelayan di Pelabuhan Perikanan Poumako. Dengan demikian hipotesis diterima.

Pembahasan Hasil Analisis Dampak Kebijakan Terhadap Tangkapan

Berdasarkan hasil analisis Uji Paired T test nilai probabilitas (sig) yaitu 0,000 dan t-hitung sebesar -6,588 menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah kebijakan ini berlaku. Hal ini disebabkan karena sebelum kebijakan ini berlaku

nelayan yang umumnya ukurannya kecil hanya menangkap ikan dari sisa kapal-kapal asing yang ukurannya yang lebih besar dan menggunakan alat tangkap yang canggih hingga mengurangi jangkauan nelayan.

Berlakunya kebijakan ini memberikan ruang bagi nelayan lokal untuk menangkap ikan yang jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya dikarenakan tidak adanya kapal besar asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah tersebut yang saat ini nelayan rasakan peningkatan tangkapannya.

Meningkatnya jumlah tangkapan memberikan dampak positif bagi nelayan kawasan tersebut yang diharapkan akan meningkatkan jumlah pendapatan nelayan lokal serta kesejahteraan nelayan yang berada di Pelabuhan Perikanan Poumako.

Dampak Kebijakan Terhadap Pendapatan

Berdasarkan hasil analisis Uji Paired T test nilai probabilitas (sig) yaitu 0,000 dan t-hitung sebesar -7,607 menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah kebijakan ini berlaku terhadap pendapatan, hal ini terjadi karena nelayan dapat menangkap yang lebih banyak daripada sebelumnya dibanding dengan harga ikan yang naik juga. Dengan tidak adanya kapal pencuri ikan, maka ikan memiliki waktu yang lebih panjang untuk berkembang yang hasilnya kemudian dirasakan oleh nelayan saat ini.

Dampak positif dari kebijakan moratorium ini yaitu mengembalikan pengelolaan kekayaan sumber daya laut kepada nelayan dalam negeri yang akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan nelayan lokal.

Dampak Kebijakan Terhadap Jarak Tempuh

Berdasarkan hasil analisis Uji Paired T test nilai probabilitas (sig) yaitu 0,000 dan t-hitung sebesar 13,663 menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah kebijakan ini berlaku terhadap jarak tempuh. Hal ini disebabkan karena sebelum kebijakan ini berlaku nelayan menempuh jarak yang jauh dan membutuhkan waktu yang semakin lama pula, hal ini menimbulkan borosnya bahan bakar.

Hal ini tidak sejalan dengan teori Masyhuri (Rahmasari, 2017:167) yaitu faktor jarak tempuh melaut karena jarak tempuh yang semakin jauh akan mempunyai lebih banyak kemungkinan memperoleh hasil tangkapan (produksi) yang lebih banyak dan tentu memberikan pendapatan yang lebih besar dibandingkan penangkapan dekat pantai.

Namun yang terjadi setelah kebijakan ini berlaku banyak memberikan dampak yang baik dalam hal jarak tempuh, sehingga waktu melaut dan bahan bakar yang digunakan lebih efektif. Dengan berkurangnya jarak tempuh membuat nelayan lebih

mudah menjangkau tangkapan yang sebelumnya sulit terjangkau karena beroperasinya kapal asing tersebut.

upaya peningkatan hasil tangkapan serta peningkatan penadapatan guna mewujudkan kesejahteraan nelayan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hasil analisis Uji Paired T test hasilnya adalah terdapat perbedaan terhadap hasil tangkapan nelayan, pendapatan serta jarak tempuh nelayan dalam melaut sebelum dan sesudah kebijakan moratorium kapal eks asing berlaku.
- b. Dampak kebijakan moratorium kapal eks asing memberikan dampak yang positif, terutama bagi nelayan di antaranya meningkatnya jumlah tangkapan, meningkatnya jumlah pendapatan dan jarak tempuh yang dekat sehingga memudahkan nelayan dalam melaut.

Saran

Adapun saran dari penelitian ini sesuai kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan moratorium kapal eks asing sehingga tepat sasaran dan tidak adanya lagi pelanggaran dalam kegiatan penangkapan.
- b. Memberikan sosialisasi kepada nelayan mengenai

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing kementerian Kelautan Dan Perikanan. *Laporan Pembangunan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Mimika Tahun 2015-2019*, Timika, 2019

Erwin. *"Analisis Potensi Sumberdaya Perikanan Wilayah Pesisir Dalam Menunjang Kesejahteraan Nelayan Di Distrik Mimika Barat Kabupaten Mimika"*. Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan STIE Jembatan Bulan, Timika, 2017.

Mahmudah, Nunung. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Kelautan dan Perikanan. *Data Statistik Kelautan dan Perikanan Tahun 2018*, Timika, 2018.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium)

- Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. *Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: 2012.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16/Permen-KP/2016 tentang Kartu Nelayan. Soeratno, dan Lincolin Arsyad. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008.
- Rahmasari, Lisda. *“Pengaruh Jarak Tempuh Melaut, Lama Bekerja Dan Teknologi Terhadap Pendapatan Nelayan.”* Jurnal Saintek Maritim, Vol XVI (2), 2017, Hal 167
- Sa’adah, Umi. *“Analisis Strategi Pemasaran Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”* Skripsi Sarjana, Program Studi Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, Lampung, 2017.
- Syam, M.Yusuf. *“Analisis Karakteristik Nelayan Buruh dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan di Kabupaten Pesisir Selatan (Study Kasus Kecamatan Pancung Soal)”*. Vol 5 (2), 2014.
- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan Timika, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) dan Artikel Penelitian*. 2018: Hal. 21;22.
- Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Sianturi, Sonta Purnama Ingrid Magdalena. *“Efektivitas Kebijakan Moratorium Kapal Eks Asing Terhadap Tindak Illegal Fishing Di Perairan Indonesia Periode 2014-2015.”* Journal Of International, Vol 2 (4), 2016, Hal 51,53-54.
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif*